

**PERAN KOMISI C DPRD KABUPATEN JOMBANG DALAM
PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR (STUDI DI KABUPATEN JOMBANG)**

Samsul Hudah
NIM. 212365201031

Pembimbing 1 : Drs. H Shobirin Noer, M.HI.
NIDN. 0731126512

Pembimbing 2 : Drs. Hudallah, M.Si
NIDN. 0718036205

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander. 1994. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta. Pustaka Jogja Mandiri.
- Alkadri.et.al (penyunting). 2001. *Manajemen Teknologi Untuk Pengembangan Wilayah*. Edisi Revisi. Jakarta: Pusat Pengembangan Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah-BPPT Press.
- Arbit, Sanit. 1985. *Perwakilan Politik Indonesia*. Jakarta. Rajawali.
- Asshiddiqie, Jimly. 1993. *Gagasan kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan pelaksanaannya di Indonesia: pergeseran keseimbangan antara Individualisme dan Kolektivisme dalam Kebijakan Demokrasi Politikdan Demokrasi Ekonomi selama tiga masa Demokrasi*. Disertasi. Tidak Terpublikasi. Jakarta: Fakultas Hukum PPS Universitas Indonesia.
- Budiardjo, Miriam. 1980. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama
- Direktorat Pengembangan Wilayah dan Transmigrasi.2003 *Pendekatan Pengembangan Wilayah*.
- Edi, Suharto. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian strategis pembangunan kesejahteraan social dan pekerjaan sosial*, Bandung. Aditama.
- Huraerah, Abu, 2011. *Pengorganisasian Pengembangan Masyarakat, Model Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung. Humaiora

Kamilah, Muthia. 2014. *Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Pengelolaan APBD Tahun 2014 Kota Balikpapan*. Skripsi. Dipublikasikan Universitas Mulawarman.

Kuncoro, Mudrajat. 1997. *Ekonomi Pembangunan: Teori masalah dan kebijakan*. Yogyakarta. Cetakan pertama. Unit penerbitan dan percetakan akademi manajemen perusahaan YKPN.

Siagian, P. Sondang. 1995. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.

Soehardjo, Rudy. 2004. *Mengenal Pelaksanaan Tugas DPRD Kabupaten/Kota*. Semarang: Aneka Ilmu.

Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta. Bumi Aksara.

Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba.

Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 5 Tahun 2010 *tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2010 – 2014*.

Undang-undang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib DPRD.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Daerah